

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP
BELANJA DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

Juwari¹, Dwi Susilowati², Christine April Dayanti Sitinjak³

¹²³Universitas Balikpapan

¹juwari@uniba-bpn.ac.id

²uniba_mrsdwi@yahoo.com

³christinesitinjak82@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan dari tahun 2010-2018 yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Hasil uji simultan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah Daerah Kota Balikpapan Karena F_{hitung} lebih kecil F_{tabel} . Sedangkan hasil uji secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dari hasil uji secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dominan terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan Karena nilai t_{hitung} dan r parsial yang paling besar dibandingkan dengan kedua variabel lainnya

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Belanja Daerah.

ABSTRACT

This research aims to know the influence of simultaneous or partially variable Local Revenues, Balance Funds, Other Legitimate Income Toward Regional Expense on Balikpapan city. In year 2010-2018 obtained from the Office Regional Financial and Asset Management of Balikpapan. The technique of determination of sample in this study using saturated sample. Test result simultaneously that The effect of Local Revenues, Balance Funds, and Other Legitimate Income Toward Regional Expense on Balikpapan city. Collectively have a not significant influence on the Balikpapan city. Because F_{hitung} is smaller than F_{tabel} . While the test results that partially Local Revenues has a positive effect and significant, Balance Funds has a positive effect and not significant, and Other Legitimate Income has a negative effect and not significant. Test results that partially Local Revenues has a dominant influence Regional Expense on Balikpapan city because value t_{hitung} and the partial r most large compared to other variable second.

Keywords: Local Revenues, Balance Funds, Other Legitimate Income, Regional Expense.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralisasi mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya guna terwujud pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis, dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintah.

Otonomi daerah memberikan peluang kepada masing-masing daerah untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan mempertahankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Juwari, J., & Ulfah, Y. (2016). Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara pajak dan retribusi serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah secara tidak langsung.

Samad & Rita (2013) Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Wati dan Fajar (2017) Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan yang bersangkutan. Kainde (2013) Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia.

Ferdiansyah, Deviyanti dan Pattisahusiwa (2018) Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam pelaksanaan Desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan subsidi dari pemerintah pusat. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif atau pandangan yang lebih luas tidak hanya dapat ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Menurut Mangowal (2013) Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah semua hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Halim dan Kusufi (2012) Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah.

Wati dan Fajar (2017) Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Dalam kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintahan daerah untuk membiayai kegiatan operasi utamanya sehari-hari dari segi pendapatan, kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan (2018) Kota Balikpapan yang telah lama berkembang sebagai kota pelabuhan dan industri pengilangan minyak juga merupakan pusat transit bagi regionnya dan kota-kota lain yang berkembang disekitarnya. Dengan posisi yang sangat strategis tersebut, kota Balikpapan tidak saja menunjang pengembangan ekonomi wilayah, tetapi juga tumbuh menjadi pusat kegiatan pengendalian usaha dan produksi penting di Kalimantan Timur.

Sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur, Kota Balikpapan memerlukan jalan yang baik sebagai sarana dan prasarana penunjang pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Selain itu, peningkatan

pembangunan jalan diperlukan guna mempermudah mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah yang lain. Untuk membangun Kota Balikpapan yang jumlah penduduknya cukup besar dengan berbagai karakteristik penduduk, pemerintahan daerah Kota Balikpapan juga dihadapkan pada masalah pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah strategis agar dapat melaksanakan pembangunan secara optimal, dengan tetap menjaga stabilitas kesatuan dan persatuan bangsa terutama dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mengatur pelaksanaan penerimaan dan belanja pembangunan daerah sehingga potensi pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat dihindari.

TINJAUAN PUSTAKA

Bawono dan Novelsyah (13:2012) menyatakan semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan maka semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan tolak ukur dalam keberhasilan otonomi daerah.

Ferdiansyah, Deviyanti dan Pattisahusiwa (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur karna Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerahnya. Yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin longgar alokasi Belanja Daerah, sehingga terhadap hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. H^1 : Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan digunakan untuk mendorong tercapainya otonomi daerah sehingga dapat membiayai kegiatan yang ada di pemerintah daerah.

Wati dan Fajar (2017) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditunjukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah, dana perimbangan bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik yang digunakan dalam mendanai kebutuhan daerah yaitu Belanja Daerah.

H²: Variabel Dana Perimbangan (X₂) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Melalui hibah, Pemerintah daerah menerima pendapatan melalui bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Sedangkan pendapatan darurat diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai keperluan yang mendesak yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu yang tidak bisa ditanggulangi oleh Belanja Daerah APBD. Jika Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah naik, maka Belanja Daerah juga akan naik dan sebaliknya. Peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan meningkatkan alokasi belanja daerah pemerintah daerah dalam APBD.

Asari dan Suardana (2018) menyatakan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif yang artinya jika Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan meningkatkan alokasi Belanja Daerah pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. H³: Variabel Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah (X₃) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Dalam definisi operasional ini penulis akan memberikan gambaran-gambaran secara jelas mengenai indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti maka diperlukan penjabaran dalam bentuk operasionalnya sebagai berikut:

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada intinya, Dana Perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK).

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Yang terdiri dari Hibah, Dana darurat dari pemerintah, Dana bagi hasil pajak, Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, Bantuan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah kota Balikpapan Tahun 2010 - 2017 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan. Teknik penarikan sampel dilakukan secara sampling jenuh, artinya bahwa populasi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai yang di kehendaki oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali (2018:107).

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Ghozali (2018:137)

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi.

Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,851 ^a	,724	,559	334903927367,370	3,115

a. Predictors: (Constant), LLPDYS, PAD, DP
b. Dependent Variable: BD

(Sumber: Hasil Print Output SPSS)

Berdasarkan output diatas dapat dilihat nilai Koefisien determinasi yang disesuaikan *adjusted R Square*. Nilai *adjusted R square* adalah 0,724 artinya 72,4% menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X_3) mempunyai pengaruh sebesar 72,4% terhadap Belanja Daerah (Y) pada Kota Balikpapan sedangkan sisanya 27,6 persen ($100\% - 72,4\% = 27,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini.

Uji-F

Pengujian signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression 147438248185413 8200000000,000	3	491460827284712 750000000,000	4,382	,073 ^b
	Residual 560803202830443 4500000000,000	5	112160640566088 690000000,000		
	Total 203518568468458 1600000000,000	8			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), LLPDYS, PAD, DP

(Sumber: Hasil Print Output SPSS)

Tabel ini menunjukkan hasil uji F sebesar 4,382 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti secara keseluruhan atau secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X_3) terhadap Belanja Daerah (Y) pada Laporan Realisasi Kota Balikpapan.

Uji-t

Pengujian regresi secara parsial (uji t) berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi 0,05.

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	39049838589	72229887457		,541	,612			
	7,670	1,393						
1	PAD	1,660	,602	,663	2,758	,040	,955	1,048
	DP	1,226	,698	,461	1,757	,139	,801	1,248
	LLPDYS	-1,258	,863	-,376	-1,458	,205	,829	1,207

a. Dependent Variable: BD
(Sumber: Hasil Print Output SPSS)

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel Belanja Daerah Kota Balikpapan dengan pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini sejalan dengan Asari dan Suardana (2018), Pratami dan Dwirandra (2017), Aminus (2018), Sari dan Indrajaya (2014) bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan alasan karna Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha dari pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerahnya. Yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan tolak ukur dalam keberhasilan otonomi daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin longgar alokasi Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat.

Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. Penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya karena Dana Perimbangan pada Kota Balikpapan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan pada tahun 2013 penurunan tersebut disebabkan oleh Dana Bagi Hasil dari sektor pajak/maupun non pajak yang menurun. Pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan secara berturut-turut pada dana bagi hasil dari sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang berdampak pada penerimaan dana bagi hasil Kota Balikpapan sehingga untuk penerimaan Dana Perimbangan tidak melampaui dari target yang telah dianggarkan, padahal dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan

yang memiliki kontribusi paling besar untuk penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan.

Hubungan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan Belanja Daerah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. Penelitian ini sejalan dengan Pratami dan Dwirandra (2017) dengan alasan karena Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Kota Balikpapan merupakan pendapatan yang memiliki nominal paling rendah diantara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pada realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup signifikan sehingga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Kota Balikpapan tidak bisa dijadikan alternatif pendapatan pada Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Balikpapan dengan periode 2010 sampai dengan 2018.

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis data bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan variabel Belanja Daerah, hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi simultan.

Berdasarkan hasil analisis secara simultan berpengaruh tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan karena F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} .

Berdasarkan uji parsial, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil regresi dari ketiga variabel independen menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

Mempertahankan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama di sektor pajak daerah sehingga pemerintah Kota Balikpapan bisa membiayai Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan Kota Balikpapan.

Sebaiknya pemerintah daerah Kota Balikpapan memanfaatkan Dana Perimbangan dengan mengalokasikan dana sesuai dengan anggaran Kota Balikpapan sehingga tujuan dari Dana Perimbangan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat.

Harus ada kesadaran bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya lebih menguji dan mengawasi belanja dan biaya-biaya yang terjadi. Sehingga tidak terdapat pengeluaran belanja daerah yang berlebihan atau perlu ada pengurangan dalam belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017. Jakarta-Indonesia.
- Christian Kainde. 2013. "Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung". Jurnal EMBA Vol. 1, No. 3 : 393-400.
- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin. 2017. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Yogyakarta: UPP Stim Ykpn.
- I Ghazali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Icuk Rangga Bawono dan Mochamad Novelsyah. 2012. Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD. Jakarta: Salemba Empat.
- Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salmah Pattisahusiwa. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah". FEB UNMUL Inovasi Vol. 14, No 1. Januari. ISSN: 0216-7786.
- Irlan Fery Idris. 2016. "Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin". European Journal Of Accounting, Auditing And Finance Research Vol.4 No.1 PP 28-42.
- Jessy Christine Mangowal. 2013. "Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Manado". Jurnal EMBA Vol. 1, No. 4: 1386-1396.
- Juwari, J., setyadi, djoko, & Ulfah, Y. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan. Jurnal GeoEkonomi, 7(1), 1-15.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.

- Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung". *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol 1, (1), 2017, 59-72 e2579-9991, p2579-9975. ISSN:0216-7786.
- Moehaditoyo Ujianto, Srie Hartutie dan Amin. 2017. *Keuangan Negara*. Surabaya: Indomedia Pustaka.
- Moh Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Mudrajad Kuncoro. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ni Made Arni Asari Dan Ketut Alit Suardana. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 25, No. 2, November. ISSN: 2302-8556.
- Nurkholis dan Moh Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramono Hariadi, Yanuar E Restianto dan Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Putu Nandya Indah Pratami dan N B Dwirandra. 2017. "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, LPDS, Dan PDRB Pada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 18, No. 2, Maret ISSN:2302-8556.
- R. Putra Samad dan Rita Yani Iyan. 2013. "Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Vol.3 No.8. Maret 2013:103-122. ISSN:2087-4502.
- Rahmi Aminus. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Organ Ilir". *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri* Vol. 9, No.1, Juli. ISSN: 2089-6018.
- Rosy Puspita Sari dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung". *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 3, No. 9:452-459. ISSN: 2303-0178.
- Rudy Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Subandi. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- V Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.